

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*.

Paket peraturan perundang-undangan tersebut menggantikan ketentuan perundang-undangan warisan kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan pengelolaan keuangan Negara modern. Selain paket peraturan perundang-undangan keuangan tersebut diatas, juga telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan pengaturan keuangan sehubungan dengan adanya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: 1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 3). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 4). Peraturan Pemerinta Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 5). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2007 SKPD di setiap Kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai

peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*. Pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami perubahan yang besar. Bentuk Laporan pertanggungjawaban sebelumnya hanya berupa laporan perhitungan APBD, saat ini laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Faktor perilaku yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor organisasional (pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan) serta adanya konflik kognitif dan afektif yang juga berpengaruh dalam implementasi sistem yang berkaitan dengan masalah individu personal.

Penelitian ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela dan Rahmawati (2010) yaitu untuk mengetahui Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor perilaku organisasional, konflik

kognitif dan afektif dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah. Perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya meneliti Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian Siti Nurlaela dan Rahmawati (2010) meneliti Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN.

Penelitian ini akan menguji Pengaruh Keperilakuan organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, dimana sistem tersebut mulai diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor perilaku organisasional, konflik kognitif dan afektif dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah di Kabupaten Boyolali.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor keperilakuan organisasi yang meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, serta pengaruh tidak langsung konflik kognitif dan konflik afektif dalam implementasi sistem yang berkaitan dengan masalah individu agar tidak terjadi penolakan sistem yang dikembangkan.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan dengan pertanyaan riset berikut :

1. Apakah berperilaku organisasi berpengaruh langsung meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah berperilaku organisasi dengan variabel intervening dapat meningkatkan konflik kognitif, menurunkan konflik afektif yang pada gilirannya akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh langsung berperilaku organisasi dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Menguji pengaruh tidak langsung berperilaku organisasi melalui variabel intervening akan dapat meningkatkan konflik kognitif, menurunkan konflik afektif yang pada gilirannya akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi :

Dapat memberikan kontribusi dalam menambah Literatur mengenai Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Bagi Praktisi :

Sebagai Bahan Pertimbangan dan Masukan bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang transparansi dan akuntabilitas.

3. Bagi peneliti selanjutnya :

Dapat memberikan pertimbangan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Indonesia terutama yang berhubungan dengan perilaku dari pengguna.

E. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi: Faktor keperilakuan akuntansi, variabel intervening konflik kognitif dan konflik afektif, pengertian sistem akuntansi keuangan daerah, kebijakan akuntansi, akuntabilitas dan transparansi, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel, Kriteria Sampel, Metode Pengambilan Sampel, Metode Pengumpulan data, Variabel Penelitian, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini mencakup metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.